

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI BOJONEGORO

Musta'ana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro
anarochim@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out how the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) of Bojonegoro Regency in 2018. The type of research used in this study was a qualitative descriptive study, Primary Data Collection Techniques and Secondary Data Collection Techniques. This research focuses on six indicators, namely Determination of quota proposals for BPNT recipients, Determination of BPNT recipients, Realization, Fund recipients, and Implementation. Data obtained from the Social Service of Bojonegoro Regency. Based on the results of the author's research that the Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) is good, but it is necessary to pay attention again to the data of people who still have not received BPNT.

Keywords : Implementation, Non-Cash Food Assistance, Bojonegoro

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakan implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Teknik Pengumpulan Data Primer dan Teknik Pengumpulan Data Sekunder. Penelitian ini berfokus pada enam indikator yaitu Penetapan usulan quota penerima BPNT, Penetapan penerima BPNT, Realisasi, Penerima dana, dan Implementasi. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis bahwa Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah baik, namun perlu diperhatikan lagi bagi data – data masyarakat yang masih belum menerima BPNT.

Keywords : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Bojonegoro

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (www.worldbank.org). Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang senantiasa di upayakan pemerintah. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan di targetkan pada kisaran 7,00-8,00 persen di tahun 2019. Angka kemiskinan mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, tercatat menurut data BPS pada September 2017 sebesar 10,64%, mengalami penurunan 5,94% dari tahun 2007.

Upaya pengurangan kemiskinan pada tahun 2017 di perkuat, dengan penyaluran bantuan pangan secara non tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang di gunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ E-warung yang bekerja sama dengan bank. Mekanisme penggunaan satu kartu melalui perbankan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan, serta meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan keuangan formal. Di Bojonegoro sendiri sudah ada sebanyak 9 E-Warung yaitu berada di :

1. Temayang (1 E-Warung)
2. Kanor (2 E-Warung)
3. Kedungadem (1 E-Warung)

4. Tambakrejo (2 E-Warung)
5. Dander (1 E-Warung)
6. Sukosewu (1 E-Warung)
7. Bojonegoro (1 E-Warung)

Program BPNT ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Program ini juga dalam rangka mendukung SNKI sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Program ini merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli beras/telur di e-warung atau agen yang bekerjasama dengan Bank (Choesni, 2017). Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 110.000, /KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat di ambil tunai dan hanya dapat di tukarkan hanya beras atau telur di E-Warung, apabila bantuan tidak di belanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan.

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui EWarung di Kabupaten Bojonegoro, tentunya tidak terlepas dari aktor-aktor lingkup desa seperti Kepala Desa. Aktor pelaksana yang terdiri dari pendamping desa, Koordinator di kelurahan dan lurah dan masyarakat setempat yang ikut membantu dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kabupaten Bojonegoro. Peran aktor pelaksana tersebut sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program ini juga yang menentukan sukses tidaknya adalah pemerintah kelurahan, karena program ini di terapkan di kelurahan.

Mulai Mei 2018 Bojonegoro menjalankan program BPNT, pada saat program Rastra di Bojonegoro jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 121.462 orang. Setelah berjalannya BPNT Mei 2018 data penerima BPNT sebanyak 109.825 orang.

Dari data di atas Dinsos telah memverifikasi penerima BPNT yakni ada selisih sebesar 11.637 orang yang dulunya menerima RASTRA tetapi sekarang tidak menerima BPNT, di karenakan ada sebagian yang sudah menjadi mampu dalam hal ekonomi, adapun juga yang sudah meninggal dunia.

Dinas Sosial tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini di karenakan Dinas Sosial mendapatkan data tersebut langsung dari Kelurahan. Karena kelurahan-lah yang tau mana warga yang berhak menerima Program BPNT ini. Setelah di lakukan penelitian ternyata pihak dari perangkat Desa yang menyalah gunakan data tersebut, misalnya lebih mengutamakan temannya dahulu yang

mendapatkan BPNT tanpa di lihat orang tersebut mampu atau tidak. Sehingga ada warga yang lebih membutuhkan tetapi justru tidak bisa menerima program BPNT ini. Dalam hal ini sesungguhnya bisa langsung di adukan ke Dinas Sosial dengan cara membawa bukti, seperti: Foto Rumah. Dengan adanya bukti tersebut Dinas Sosial bisa bertindak/ mencabut bantuan tersebut dan di berikan kepada warga miskin yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang “Bagaimana Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bojonegoro Tahun.2018”. Dimana rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan menggunakan landasan teori Van Metter dan Van Carl Horn yang meliputi 6 faktor yang berpengaruh dalam implemementasi program yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Selain itu, fokus penelitian ini menggunakan 5 faktor yang berpengaruh dalam implemementasi program yaitu :

1. Usulan Penetapan Quota Penerima BPNT
2. Penerima BPNT
3. Realisasi
4. Penerima Dana
5. Implementasi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual.

Dari pengertian diatas maka populasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah populasi heterogen yaitu seluruh Masyarakat yang menerima program BPNT Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel untuk tujuan tertentu, sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Sosial yang terlibat dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Masyarakat yang termasuk golongan Keluarga Penerima KPM (KPM).

Terkait dengan fokus penelitian ini, maka informan yang dtentukan sebagai sampel atau sumber data utama dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yaitu:

- a. Pegawai Dinas Sosial : 3 orang
- b. Masyarakat KPM : 3 orang

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Alamat Jl. Panglima Sudirman No.24, Kepatihan, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 6211.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan

Huberman dalam Sugiyono (2009: 246) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah 6 poin penting yang dianalisa untuk mengetahui bagaimana implementasi BPNT di Bojonegoro tahun 2018 :

1. Usulan Penetapan Quota Penerima BPNT

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan. Langkah pemerintah yang mulai mentransformasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dianggap dapat lebih memanusiakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Dulung. Menurutnya, kehadiran BPNT membuat penerima bansos memiliki hak

dan kebebasan memilih kebutuhan melalui bantuan yang diberikan.

Salah satu program yang diubah menjadi BPNT adalah program beras sejahtera (Rastra). Proses peralihan yang dijalankan oleh Ditjen PFM itu, sudah dimulai sejak 2017. Program tersebut ditargetkan dapat menysasar 10 juta KPM pada akhir 2018. Dalam implementasinya, Ditjen PFM Kemensos menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan BPNT. Melalui Himbara, bantuan sebesar Rp110.000 tersebut akan langsung disalurkan melalui rekening atas nama penerima bantuan. Uang tersebut dapat dibelanjakan penerima bantuan untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Himbara.

Keunggulan lainnya, KPM juga bisa membeli bahan pokok lain selain beras, yaitu telur. Namun bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai keinginan.

Sebanyak 121.462 KK yang kurang mampu di kabupaten Bojonegoro, yang pada tahun 2017 tersebut menerima RASTRA dan hal ini juga akan menjadi data penerima BPNT pada tahun 2018.

2. Penetapan Penerima BPNT

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) diantaranya BTN, BNI, BRI dan Bank Mandiri, yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Di kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 109.827 orang warga miskin di Kabupaten Bojonegoro yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

dengan menggunakan kartu gesek (akun elektronik) yang difasilitasi oleh Bank BNI.

3. Realisasi

Program BPNT merupakan perubahan bantuan pangan langsung (Rastra). Setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp 110.000 per bulan. Uang yang disalurkan melalui rekening perbankan diperuntukkan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur. Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro berusaha untuk memenuhi semua program tersebut agar semua terealisasi dengan baik demi mengurangi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro memulai KPM pada November 2017 yaitu pembukaan rekening, Januari 2018 pengambilan rekening, Mei 2018 berjalannya BPNT. Di dalam masyarakat Kabupaten Bojonegoro Realisasi setiap bulannya pasti berubah di karenakan pagu Rp. 110.000,- yang diberikan dan setiap tanggal 25 tidak harus habis dan bisa di belanjakan di bulan berikutnya.

4. Penerima Dana

Proses penyaluran BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahkan dana ke rekening KPM , penyaluran tersebut dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan. Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5. Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang

elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-Warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur .

Melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah menyediakan bantuan dalam bentuk uang non tunai sebesar Rp. 110.000 yang tidak dapat di cairkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk beras 5 Kg dan telur 2 Kg yang dapat di di E-Warung (warung khusus untuk program BPNT) yang mana akan buka apabila program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut turun.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kabupaten Bojonegoro dengan Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro merupakan data yang bersumber dari desa, namun jika masih banyak pengaduan atas ketidaktepatan sasaran maka pihak desa bisa mengalihkan kepada mereka yang memang membutuhkan. Pengalihan ini harus dilaporkan disertai dengan bukti-bukti, yang sebelumnya diawali dengan rapat ditingkat desa.

Sebanyak 121.462 KK yang kurang mampu di kabupaten Bojonegoro, yang pada tahun 2017 tersebut menerima RASTRA dan hal ini juga akan menjadi data penerima BPNT pada tahun 2018.

Menurut keterangan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dari Total 121.462 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu di Kabupaten Bojonegoro yang terdata penerima BPNT baru ada 109.827 yang sudah menerima kartu gesek , sedangkan sisanya gagal membuka rekening. Perihal permasalahan pembukaan rekening dikarenakan ada sebagian warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mempunyai E-KTP, Nomor NIK yang tidak terdeteksi, Para lansia yang tidak dapat menggunakan kartu elektronik, Penerima

KPM sudah ada yang meninggal tidak ada yang mengurus hak warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Andika, Norman. 2010. *Implementasi program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di puskesmas jagir*.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Barnard, Sharmani dkk. 2013. *Impact of Indian Total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use: A Cross-Sectional Study in Orissa Three Years following Programme Implementation: e71438*.

Hamdi, Muchlas. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Juniar, Midia. 2013. *Studi tentang Implementasi Program sanitasi dan Pemasaran Sanitasi (SToPS) dalam perspektif Delibertaif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Volume 1 Nomer 1*.

Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warung KUBE.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.